



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra), dengan menampilkan kinerja yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024. Adapun indikator pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja input, output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih, khususnya kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Purwakarta, 18 Februari 2025

Pt. KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA



H. RAHMAT HERIANSYAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19681107 199010 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi tuntutan publik berupa adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, maka diperlukan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan dari atasan masing-masing kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berwenang dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang memuat informasi capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja.

Pada dasarnya LAKIP merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selama Tahun 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan Kinerja Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Dimana Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta terdiri dari : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Sedangkan Indikator Sasaran yang diukur kinerjanya terdiri dari : Capaian Sakip Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat; Indeks Desa Membangun.

Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan, Indikator Sasaran Strategis Capaian Sakip Perangkat Daerah **telah melebihi target, yaitu sebesar 112.5%**. Indikator Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat **telah sesuai target, yaitu sebesar 100%**. Terakhir, Indikator Sasaran Strategis Indeks Desa Membangun, juga **telah sesuai target, yaitu sebesar 100%**.

Penyerapan anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada APBD Perubahan Tahun 2024 mencapai sebesar **Rp18.648.089.283,00** atau **89.15%** dari total anggaran yang dialokasikan yaitu **Rp20.915.340.178,00**. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan teknis pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai sebesar **Rp8.792.046.291,00** atau **91%** dari anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp9.623.818.915,00**. Sedangkan Realisasi untuk Program/Kegiatan Non Teknis atau Program/Kegiatan Pelaksanaan Kesekretariatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta mencapai sebesar **Rp9.856.042.992,00** atau **87%** dari anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar **Rp11.291.521.261,00**.

Permasalahan dan hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan harus mendapat perhatian untuk kemudian diperbaiki pada Tahun Anggaran 2025, hendaknya digunakan sebagai motivasi bagi seluruh jajaran aparatur DPMD Kabupaten Purwakarta guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | I - 1 |
| 1.1 Latar Belakang | I - 1 |
| 1.2 Dasar Hukum | I - 3 |
| 1.3 Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Purwakarta | I - 5 |
| 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi DPMD Kabupaten Purwakarta | I - 8 |
| 1.5 Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis Organisasi) | I - 9 |
| 1.6 Sistematika Pelaporan | 1 - 10 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | II - 1 |
| 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran | II - 1 |
| 2.2 Rencana Kinerja Tahunan | II - 3 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja | II - 7 |
| 2.4 Rencana Penganggaran | II - 10 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | III - 1 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | III - 1 |
| 3.2 Realisasi Anggaran | III - 15 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | IV - 1 |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|-----------|---|-------|----------|
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran DPMD Tahun 2024 - 2026 | | II - 3 |
| Tabel 2.2 | Program dan Kegiatan DPMD Tahun 2024 | | II - 4 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja DPMD Tahun 2024 | | II - 7 |
| Tabel 2.4 | Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 | | II - 9 |
| Tabel 2.5 | Program, Kegiatan dan Anggaran Perubahan Tahun 2024 | | II - 13 |
| Tabel 3.1 | Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 | | III - 2 |
| Tabel 3.2 | Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dan Target Kinerja Tahun 2024 | | III - 6 |
| Tabel 3.3 | Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dan Tahun 2024 | | III - 7 |
| Tabel 3.4 | Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024 dan RPD (Tahun 2026) | | III - 8 |
| Tabel 3.5 | Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan dan Desa Tahun 2024 dan Standar Nasional dan Provinsi Tahun 2024 | | III - 10 |
| Tabel 3.6 | Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Capaian Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 | | III - 11 |
| Tabel 3.7 | Analisis Keberhasilan, Kegagalan Progra Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 | | III - 14 |
| Tabel 3.8 | Realisasi Anggaran Tahun 2024 | | III - 17 |
| Tabel 3.9 | Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | | III - 29 |

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024**
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- 3. SOTK DPMD Kabupaten Purwakarta**

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, DPMD Kabupaten Purwakarta telah menyusun suatu pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LAKIP DPMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja DPMD Kabupaten Purwakarta kepada Bupati, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan korupsi;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
22. Peraturan Bupati Purwakarta No. 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta

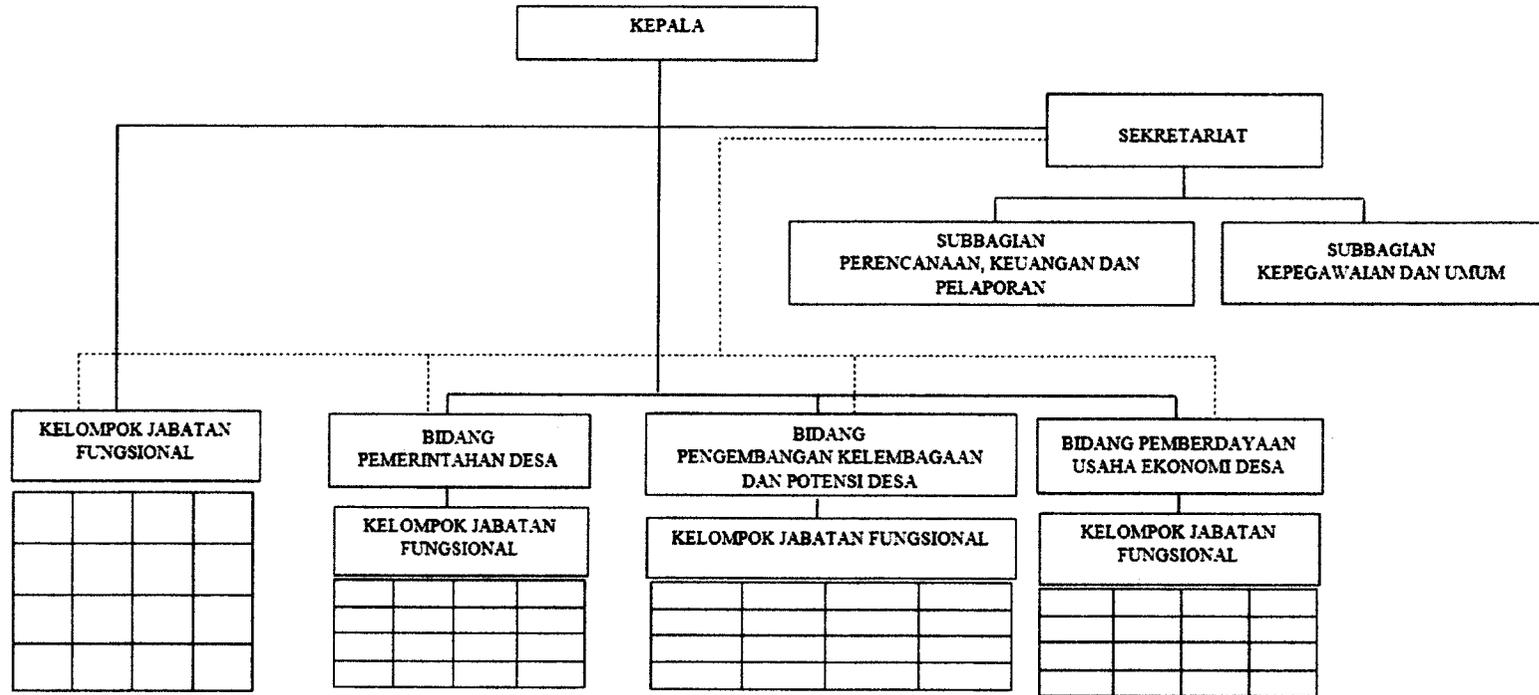
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupate Purwakarta terdiri dari atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Sub-subtansi Tata Pemerintahan Desa;
 - 2. Kelompok Sub-subtansi Administrasi dan Perangkat Desa; dan
 - 3. Kelompok Sub-subtansi Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- d. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Sub-subtansi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - 2. Kelompok Sub-subtansi Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - 3. Kelompok Sub-subtansi Sarana dan Prasarana Desa.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa, terdiri atas :
 - 1. Kelompok Sub-subtansi Lembaga Usaha Ekonomi Desa;
 - 2. Kelompok Sub-subtansi Pemasaran Usaha Ekonomi Desa; dan
 - 3. Kelompok Sub-subtansi Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Desa.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 38 TAHUN 2023
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWAKARTA



BUPATI PURWAKARTA
 TTD
 ANNE RATNA MUSTIKA

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dimana secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa;

- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

1.5. Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis Organisasi)

Aspek Strategis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPMD Kabupaten Purwakarta sebagai komponen dalam meningkatkan kinerja program dan kegiatannya adalah :

1. Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Pembinaan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis sesuai kebutuhan.
2. Meningkatkan pembangunan wilayah pedesaan melalui peningkatan partisipasi masyarakat.
3. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat pedesaan melalui pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan dengan pemanfaatan SDA berbasis TTG.
4. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa dan Pengelolaan keuangan desa yang baik melalui Pembinaan, Sosialisasi, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis yang berbasis teknologi informasi.

1.6. Sistematika Laporan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun melalui sejumlah tahapan, meliputi :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

III.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan rencana pembangunan tahunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk pencapaian dalam tahun tertentu.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang telah ada, Rencana Kinerja Tahun 2024 telah dirumuskan dan merupakan suatu dokumen tidak terpisahkan dan memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024. Kegiatan yang ditetapkan mengacu kepada program-program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam RKT merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Penetapan Kinerja Tahun 2024 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Renstra dan Rencana Kinerja Tahun 2024 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi

dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu :

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional; Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan; dan Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Unsur Penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peranan dalam pencapaian Misi Kelima yaitu **"Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat"**.

Dalam rangka melaksanakan dan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan, khususnya misi kelima, maka Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024-2026

| Tujuan/Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | | Target | | |
|---|-----------------------------------|-------------|--------------|------|--------|------|------|
| | | | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TUJUAN | | | | | | | |
| 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel | 1. Capaian Sakip Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB |
| | 2. Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa | 3. Indeks Desa Membangun | Nilai/Point | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju |
| SASARAN | | | | | | | |
| 1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1. Capaian Sakip Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB |
| | 2. Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| 2. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa | 3. Indeks Desa Membangun | Nilai/Point | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju |

Sumber : Renstra DPMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap tahunnya, maka

perlu ditunjang oleh Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan agar Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian target tujuan dan sasarannya dapat tercapai. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

| PROGRAM/ KEGIATAN | | SUB KEGIATAN | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| | | 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah | 6 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |
| 4 | Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah | 7 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya |
| | | 8 | Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | | 10 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| | | 11 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | 12 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | | 13 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | 14 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 15 | Pengadaan Mebel |
| | | 16 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | 17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | 19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | 20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |

| PROGRAM/ KEGIATAN | | SUB KEGIATAN | |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | 22 | Pemeliharaan Mebel |
| | | 23 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| | | 24 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| II | PROGRAM PENATAAN DESA | | |
| 8 | Penyelenggaraan Penataan Desa | 25 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa |
| | | 26 | Fasilitasi Penataan dan Kewenangan Desa |
| | | 27 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | 28 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa |
| III | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | |
| 9 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa | 29 | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota |
| | | 30 | Fasilitasi Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota |
| | | 31 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan |
| IV | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | |
| 10 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 32 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |
| | | 33 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa |
| | | 34 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa |
| | | 35 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |
| | | 36 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa |
| | | 37 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa |
| | | 38 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa |
| | | 39 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa |
| | | 40 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa |
| | | 41 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa |
| | | 42 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa |
| | | 43 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa |

| PROGRAM/ KEGIATAN | | SUB KEGIATAN | |
|----------------------|---|-----------------|--|
| | | 44 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa |
| | | 45 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD |
| | | 46 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
| | | 47 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa |
| | | 48 | Pelaksanaan Penugasan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Oleh Desa |
| | | 49 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan |
| V | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | |
| 11 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 50 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
| | | 51 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
| | | 52 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
| | | 53 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan pendapatan Asli Desa |
| | | 54 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
| | | 55 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat |
| | | 56 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta Tahun 2024

2.3. Perjanjian Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, terdapat 2 (Dua) Tujuan dan 2 (Dua) Sasaran dengan 3 (Tiga) Indikator. Sedangkan Program Pencapaian Tujuan dan Sasaran terdapat 5 (Lima) Program yang terdiri dari 4 (Empat) Program Teknis dan 1 (Satu) Program Non

Teknis, dengan total anggaran sebesar Rp 20.292.519.871,00. Berikut adalah Tabel Perjanjian Kinerja DPMD dan Rincian Rencana Program di DPMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja DPMD Tahun 2024

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 |
|-------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Capaian Sakip Perangkat Daerah | Predikat | BB |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik |
| 2 | Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa | Indeks Desa Membangun | Nilai/Point | Maju |

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|------------|---|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 10.956.492.371 | APBD Kabupaten |
| 2 | Program Penataan Desa | 225.000.000 | APBD Kabupaten |
| 3 | Program Peningkatan Kerjasama Desa | 3.700.000.000 | APBD Kabupaten |
| 4 | Program Adiministrasi Pemerintahan Desa | 2.061.987.500 | APBD Kabupaten |
| 5 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 3.349.040.000 | APBD Kabupaten |

Sumber : Penetapan Kinerja (TAPKIN) DPMD Kab. Purwakarta Tahun 2024

2.4. Rencana Penganggaran

Rencana Penganggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 mencapai sebesar Rp20.292.519.871,00 yang terdiri dari 5 (Lima) Program terdiri dari 4 (empat) Program Teknis dan 1(Satu) Program Non Teknis dengan 56 (Lima puluh enam) Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran DPMD Tahun 2024

| PROGRAM | | SUB KEGIATAN | | PAGU ANGGARAN |
|---|--|--------------|---|-----------------------|
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 20.292.519.871 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 10.956.492.371 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Daerah | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 16.081.900 |
| | | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.059.600 |
| | | 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.563.400 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.915.252.462 |
| | | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 10.000.000 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah | 6 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.700.000 |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 7 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya | 50.160.000 |
| | | 8 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 37.500.000 |

| PROGRAM | | SUB KEGIATAN | | PAGU ANGGARAN |
|---------|---|--------------|---|---------------|
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 50.000.000 |
| | | 10 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 50.000.000 |
| | | 11 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 228.948.905 |
| | | 12 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 85.008.000 |
| | | 13 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 296.809.000 |
| | | 14 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 37.500.000 |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 15 | Pengadaan Mebel | 100.000.000 |
| | | 16 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 206.183.000 |
| | | 17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 195.560.000 |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000 |
| | | 19 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 465.600.000 |
| | | 20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.773.466.104 |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 136.100.000 |
| | | 21 | Pemeliharaan Mebel | 10.000.000 |
| | | 22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200.000.000 |
| | | 23 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000 |

| PROGRAM | | | SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN |
|------------|--|----|---|----------------------|
| II | PROGRAM PENATAAN DESA | | | 1.350.000.000 |
| 9 | Penyelenggaraan Penataan Desa | 24 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | 50.000.000 |
| | | 25 | Fasilitasi Penataan dan Kewenangan Desa | 50.000.000 |
| | | 26 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | 50.000.000 |
| | | 27 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | 75.000.000 |
| III | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | | 3.700.000.000 |
| 10 | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa | 28 | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 100.000.000 |
| | | 29 | Fasilitasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | 100.000.000 |
| | | 30 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan | 3.500.000.000 |
| IV | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | 2.061.987.500 |
| 11 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa | 31 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 150.000.000 |
| | | 32 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 30.000.000 |
| | | 33 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 100.000.000 |
| | | 34 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 150.000.000 |
| | | 35 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | 150.000.000 |
| | | 36 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 30.000.000 |
| | | 37 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 30.000.000 |

| PROGRAM | | | SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN |
|----------|---|----|--|----------------------|
| | | 38 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa | 387.500.000 |
| | | 39 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 30.000.000 |
| | | 40 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 30.000.000 |
| | | 41 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 100.000.000 |
| | | 42 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 87.500.000 |
| | | 43 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 150.000.000 |
| | | 44 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 150.000.000 |
| | | 45 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 173.825.000 |
| | | 46 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | 30.000.000 |
| | | 47 | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Oleh Desa | 83.162.500 |
| | | 48 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan | 200.000.000 |
| V | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN HUKUM ADAT | | | 3.349.040.000 |
| 12 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 49 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 100.000.000 |

| PROGRAM | | | SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN |
|---------|--|----|---|---------------|
| | | 50 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 150.000.000 |
| | | 51 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 50.000.000 |
| | | 52 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan pendapatan Asli Desa | 250.000.000 |
| | | 53 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 250.000.000 |
| | | 54 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 250.000.000 |
| | | 55 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 2.500.000.000 |

Sumber : Rencana Kerja Dinas PMD Kab. Purwakarta Tahun 2024

Pada tahun 2024 Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta banyak yang mengalami perubahan anggaran dan merubah rincian objek belanja atau rincian kode rekening. Banyak sub Kegiatan yang mengalami perubahan angka dan perubahan rincian belanja hal ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan rincian objek belanja dan rincian belanja.

Alokasi Belanja Langsung yang semula dianggarkan sebesar Rp20.292.519.871,00 mengalami perubahan dari menjadi sebesar Rp20.915.340.176,00. Berikut adalah Tabel Rincian Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 :

Tabel 2.5
Program, Kegiatan dan Anggaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pada Anggaran Perubahan Tahun 2024

| PROGRAM | | SUB KEGIATAN | | PAGU ANGGARAN |
|---|--|--------------|---|-----------------------|
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 20.915.340.176 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 11.291.521.261 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Daerah | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 16.081.900 |
| | | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.059.600 |
| | | 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 110.463.400 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.010.252.462 |
| | | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 10.000.000 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah | 6 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.700.000 |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 7 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya | 55.000.000 |
| | | 8 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 37.500.000 |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 50.000.000 |
| | | 10 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 50.000.000 |
| | | 11 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 202.022.195 |

| PROGRAM | | | SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN |
|------------|---|----|---|--------------------|
| | | 12 | Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | 85.008.000 |
| | | 13 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 215.409.000 |
| | | 14 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 37.500.000 |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 15 | Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan | 71.400.000 |
| | | 16 | Pengadaan Mebel | 95.542.000 |
| | | 17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 174.809.000 |
| | | 18 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 196.693.500 |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 19 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000 |
| | | 20 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 465.600.000 |
| | | 21 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.773.466.104 |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 22 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 161.090.700 |
| | | 23 | Pemeliharaan Mebel | 10.000.000 |
| | | 24 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 380.923.400 |
| | | 25 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000 |
| II | PROGRAM PENATAAN DESA | | | 60.160.000 |
| 9 | Penyelenggaraan Penataan Desa | 26 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | 60.160.000 |
| III | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | | 125.000.000 |

| PROGRAM | | | SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN |
|---------|--|----|---|------------------|
| 10 | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa | 27 | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 100.000.000 |
| | | 28 | Fasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | 100.000.000 |
| | | 29 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan | 4.064.403.315 |
| IV | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | |
| 11 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa | 30 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 150.000.000 |
| | | 31 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 30.000.000 |
| | | 32 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 69.196.600 |
| | | 33 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 150.000.000 |
| | | 34 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | 150.000.000 |
| | | 35 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 25.730.000 |
| | | 36 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa | 346.881.000 |
| | | 37 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 111.100.000 |
| | | 38 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 30.000.000 |
| | | 39 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 53.320.000 |
| | | 40 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 87.500.000 |
| | | 41 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 100.000.000 |
| | | 42 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 150.000.000 |
| | | 43 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 93.193.000 |

| PROGRAM | | SUB KEGIATAN | | PAGU ANGGARAN |
|----------|--|--------------|--|----------------------|
| | | 44 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | 27.550.000 |
| | | 45 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan | 200.000.000 |
| V | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN HUKUM ADAT | | | 3.524.785.000 |
| 12 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat | 46 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 364.300.000 |
| | Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 47 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 150.000.000 |
| | | 48 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan pendapatan Asli Desa | 250.000.000 |
| | | 49 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 177.405.000 |
| | | 50 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 343.192.000 |
| | | 51 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 2.239.888.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja sasaran, yang didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Purwakarta. Indikator kinerja sasaran strategis ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, terdapat 2 sasaran strategis yakni :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ;

Dari 2 sasaran strategis tersebut, terdapat 3 indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024. Untuk mengetahui Kinerja Sasaran Tahun 2024 dari Target Pencapaian, Realisasi, Kemajuan dan Kendala yang dijumpai dapat dianalisis/dievaluasi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Berikut Hasil Capaian Sasaran Tahun 2024 sesuai Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Capaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | 2024 | |
|----|--|--------------------------------|-----------|-----------|
| | | | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | A | 112.5 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | 100 |
| 2 | Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa | Indeks Desa Membangun | Maju | 100 |

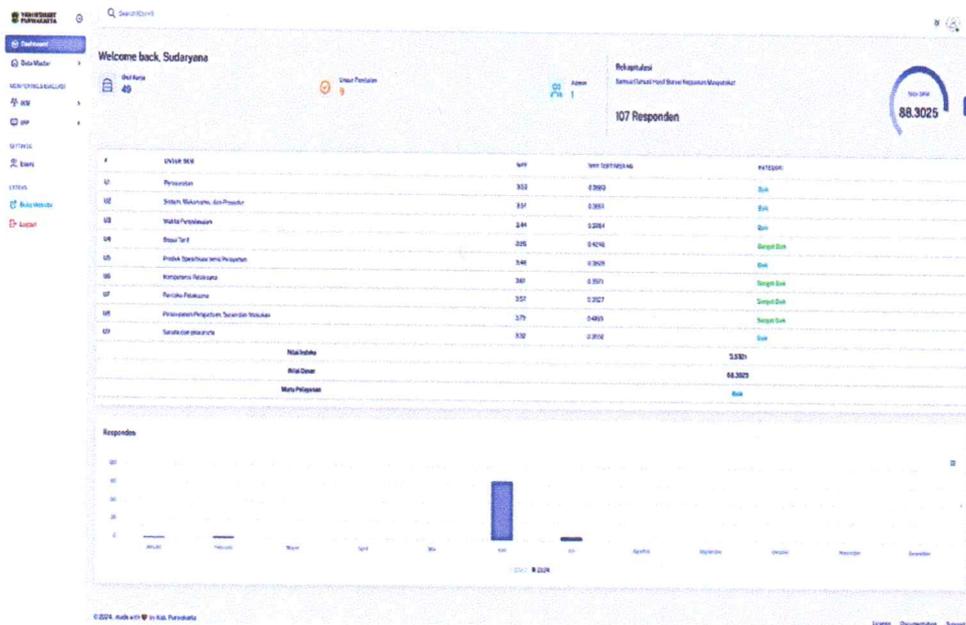
1. Capaian Sakip Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2024 hasil nilai Capaian Sakip Perangkat Daerah dari Inspektorat adalah mendapat kan nilai A (Memuaskan) dengan komponen penilaian adalah sebagai berikut :

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|------------------------------------|---|---------------------|--------------|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30.00 | 22.5 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30.00 | 22.5 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15.00 | 12.00 |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25.00 | 21.25 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | | 100 | 81.25 |
| Predikat | | A -Memuaskan | |

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada Tahun 2024 hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapatkan nilai 88.3025 (B) dan penilaian ini dapat dilihat pada aplikasi yanlik.



Indeks Pengukuran Nilai Persepsi, nilai Interval, nilai interval konversi (NIK), nilai mutu pelayanan dan nilai kinerja unit pelayanan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

| Nilai Persepsi | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | 1.00-2.5996 | 25.00-64.99 | D | Tidak Baik |
| 2 | 2.6 – 3.046 | 65.00-76.60 | C | Kurang Baik |
| 3 | 3.0644-3.532 | 76.61-88.30 | B | Baik |
| 4 | 3.5324-4.00 | 88.31-100.00 | A | Sangat Baik |

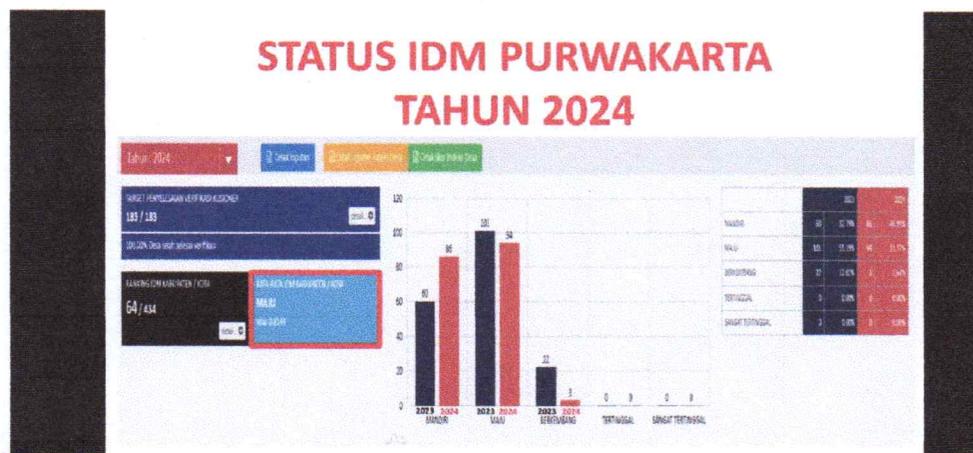
**Rekapitulasi Hasil Perhitungan SKM
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024**

| Angka | Unsur | Nilai | Nilai Konversi | Mutu Pelayanan | Predikat |
|-------|---|-------|----------------|----------------|-------------|
| A | Persyaratan | 3,53 | 88.25 | B | Baik |
| B | Sistem, mekanisme dan prosedur | 3,51 | 87.75 | B | Baik |
| C | Waktu penyelesaian | 3,44 | 86 | B | Baik |
| D | Biaya/Tarif | 3,86 | 96.5 | A | Sangat Baik |
| E | Produk layanan | 3,48 | 87 | B | Baik |
| F | Kompetensi pelaksana | 3,61 | 90.25 | A | Sangat Baik |
| G | Perilaku pelaksana | 3,57 | 89.25 | A | Sangat Baik |
| H | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | 3,79 | 94.75 | A | Sangat Baik |
| I | Sarana dan prasarana | 3,32 | 83 | B | Baik |

3. Indeks Desa Membangun

Nilai Pencapaian Realisasi Sasaran Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa , dengan Indikator Sasaran yaitu Indeks Desa Membangun, adalah :

**Capaian IDM Kabupaten Purwakarta
Berdasarkan Perhitungan Kemendes PDTT
Tahun 2024**



**Data Progres Desa Berdasarkan Kemendes PDTT
(Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa
Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan 2024**

| No | Desa | 2023 | | 2024 | |
|----|-------------------|--------|------------|--------|------------|
| | | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase |
| 1 | Mandiri | 60 | 32.79% | 86 | 46.99% |
| 2 | Maju | 101 | 55.19% | 94 | 51.37% |
| 3 | Berkembang | 22 | 12.02% | 3 | 1.64% |
| 4 | Tertinggal | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | Sangat Tertinggal | 0 | 0% | 0 | 0% |

3.1.1 Perbandingan Target Tahun 2024 dan Realisasi Tahun 2024

Pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 2 sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator Capaian Sakip Perangkat Daerah target Predikat BB dan Indeks Kepuasan Masyarakat dan target indikatornya adalah Predikat Baik;
2. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dengan indikator Indeks Desa Membangun dengan target status Maju.

Hasil capaian sasaran tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Capaian Sakip Perangkat Daerah mendapatkan nilai A capaiannya sebesar 112.5% dan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Baik dengan nilai 88.3025 (Baik/B) sehingga capaiannya 100%.

Indikator Indeks Desa Membangun berdasarkan Kemendes PDTT No. 9 Tahun 2024 Kabupaten Purwakarta mendapatkan status Maju

dengan nilai Indeks 0.8144.

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024 dan Target 2024

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR | SATUAN | TARGET 2024 | REALISASI 2024 | % |
|-------------------|--|--------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | 112.5 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | 100 |
| 2 | Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa | Indeks Desa Membangun | Point/ Status | Maju | Maju | 100 |

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 untuk Pencapaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas publik dan kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Capaian Sakip Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2023 dengan target sebesar BB dan terealisasi A. Dan Tahun 2024 target capaian sakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BB dan Capaian Hasil Sasaran untuk Indikator capaian Sakip Perangkat Daerah untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapatkan nilai A hal ini tercantum pada Laporan Hasil Evaluasi Sakip tahun 2024 oleh Inspektorat. Capaian yang didapat 112,5%

Sasaran meningkatnya akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Dinas Pemberdayaan tahun 2024 mendapat nilai 88.3025 predikat baik dengan target baik pada tahun 2024 ini sehingga capaiannya 100%.

Pada tahun 2023 sasaran strategis meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan desa dengan 2 indikator sasaran yaitu persentase Masyarakat dalam Pembangunan desa realisasi capaian targetnya 98.8 % serta Perentase Pembinaan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan capaian realisasi target sebesar 100%. Berbeda dengan tahun 2024, sasaran strategis tahun 2024 Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dengan indikator sasaran Indeks Desa Membangun Predikat Maju Capaiannya 100% pada Tahun 2024.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2023 dan Tahun 2024

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | 2023 | | | 2024 | | |
|----|--|--------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | BB | A | 112.5 | BB | A | 112.5 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | Baik | Baik | 100 |
| 2 | Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa | Indeks Desa Membangun | | | | Maju | Maju | 100 |

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026

Apabila dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Daerah (Tahun 2026) untuk Pencapaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas publik dan kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Capaian Sakip Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2026 dengan target Predikat BB. Dan Tahun 2024 target capaian sakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BB dan Capaian Hasil Sasaran untuk Indikator capaian Sakip Perangkat Daerah untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapatkan nilai A hal ini tercantum pada Laporan Hasil Evaluasi Sakip tahun 2024 oleh Inspektorat. Capaian yang didapat 112,5%

Sasaran meningkatnya akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Target Tahun 2026 adalah Predikat Baik. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 mendapat nilai 88.3025 predikat baik dengan target baik pada tahun 2024 ini sehingga capaiannya 100%.

Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dengan indikator Desa Membangun Predikat Maju Tahun 2026 dan Tahun 2024 realisasi Capaian 100%. Tingkat Kemajuan Perbandingan tersebut 100%

Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun
2024 dengan RPD (2026)

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target Akhir RPD (2026) | Tingkat Kemajuan |
|----|--|--------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=4/5*100$ |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | A | BB | 112.5 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Baik | 100 |
| 2 | Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa | Indeks Desa Membangun | Maju | Maju | 100 |

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Dari hasil rekapitulasi Desa membangun yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia, diketahui bahwa Kabupaten Purwakarta menduduki peringkat 64 dari 434 Desa kabupaten/kota se Indonesia. Rata-rata angka Indeks Desa Membangun secara Nasional adalah 0.7034 (rata-rata desa berkembang), rata-rata angka IDM Propinsi Jawa Barat adalah 0.8012. Sedangkan Jumlah Desa Mandiri di Indonesia ada 17.207 Desa Mandiri. Angka tersebut sudah jauh melampaui target RPJMN 2024, 5000 desa berstatus mandiri.

Berdasarkan keputusan Menteri Desa PDTT RI Nomor 9 Tahun 2024 status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2024, jumlah

desa di indonesia sebanyak 75.753 desa dengan jumlah desa mandiri sebanyak 17.207 desa. Jumlah Desa di Propinsi Jawa Barat sebanyak 5.312 desa dan jumlah desa mandiri sebanyak 2.447 Desa. Sehingga capaian sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Nasional dan Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dengan Standar
Nasional dan Provinsi Tahun 2024

| No | Tingkatan | Angka Indeks Desa Membangun | Jumlah Desa Berdasarkan Kepmendesa PDTT RI Nomor 9 Tahun 2024 | Jumlah Desa Mandiri | % Desa Mandiri |
|----|----------------------|-----------------------------|---|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=4/5*100$ |
| 1 | NASIONAL | 0.7034 | 75.753 | 17.207 | 22.71% |
| 2 | PROPINSI JAWA BARAT | 0.8012 | 5.312 | 2.447 | 46.07% |
| 3 | KABUPATEN PURWAKARTA | 0.8144 | 183 | 86 | 46.99% |

3.1.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengelolaan Sumberdaya yang efektif dan efisien merupakan salah salah satu kunci kesuksesan dalam pencapaian target kinerja pada suatu perangkat daerah. Hal ini anggaran dan sumberdaya manusia memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja setiap tahunnya.

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efektivitas anggaran adalah dengan perencanaan yang matang dan baik sebagai dasar bagi penentuan alokasi anggaran yang tepat dan prioritas untuk mencapai target kinerja yang diinginkan.

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah melakukan efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan anggaran dan sumberdaya manusia yang optimal dengan terlihatnya target kinerja yang tercapai pada indikator kinerja tersebut.

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Tahun 2024

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Analisis Keberhasilan/Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|----|--|--------------------------------|--------|-----------|-----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | BB | AA | 112.5 | Beberapa faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan capaian nilai SAKIP, antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah 2. Komunikasi dan Koordinasi Lintas Sektor 3. Good Governance responsive, dan kesetaraan | <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki tata kelola pemerintahan • Peningkatan akuntabilitas kinerja |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Baik | 100 | Analisis IKM dilakukan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM). SKM merupakan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif | Lebih sering mensosialisasikan link survei agar menambah jumlah responden dan menaikan nilai IKM |
| 2 | Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa | Indeks Desa Membangun | Maju | Maju | 100 | IDM merupakan alat bantu untuk mengukur kemandirian desa. IDM dapat digunakan untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan desa, serta memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan desa | Mensosialisasikan ke desa perihal IDM agar idm Kabupaten meningkat |

3.1.2 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan dalam Capaian Kinerja Tahun 2024

Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terealisasi Anggaran sebesar 89.15% dari Rp. 20.915.340.176,00 yaitu sebesar Rp18.648.089.283,00

Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Capaian Sakip Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Pada Tahun 2024 realisasi sebesar Rp9.856.042.992,00 atau 87 % dari anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp11.291.521.261,00.

Program yang mendukung sasaran Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dengan Indikator Indeks Desa Membangun Berdasarkan Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah

1. Program Penataan Desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.675.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 60.160.000,00 yaitu sebesar 79%
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.224.297.283,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 4.264.403.315,00 yaitu sebesar 99%
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.397.661.600,00 dari Jumlah Anggaran Rp. 1.774.470.600,00 yaitu 79%
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.524.785.000,00 dan Realisasi sebesar Rp. 3.122.412.408,00 yaitu sebesar 89%

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dengan Indikator Indeks Desa Membangun.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Tahun 2024 keempat Program diatas sangat mendukung kepada capaian indikator tersebut dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.792.046.291,00 dari Jumlah Anggaran Rp. 9.623.818.915,00 yaitu 91%.

Dalam Pelaksanaan Pencapaian Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, tentunya tidak terlepas dari pada faktor pendukung dan faktor yang menghambat terhadap realisasi capaian kinerja yang telah dicapai. Adapun factor pendukung berdasarkan indicator sasaran adalah sebagai berikut :

| No | Program | Faktor Pendukung | Faktor Menghambat | Penanggung jawab |
|----|--|--|---|------------------|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Kegiatan yang sifatnya rutin telah terealisasi, seperti gaji, jasa komunikasi, penyediaan alat kantor, barang cetak, penggandaan dan pemeliharaan Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga tercapai pelayanan prima | Keterbatasan anggaran dan belum lengkapnya sarana dan prasarana | Sekretariat |
| 2. | Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa | Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima | Keterbatasan anggaran dan belum lengkapnya sarana dan prasarana | Bidang-bidang |

Sehubungan dengan adanya permasalahan/faktor penghambat yang masih ditemui pada pencapaian kinerja sasaran strategis program dan kegiatan, langkah yang dilakukan oleh DPMD dalam rangka mengoptimalkan capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan sb kegiatan dengan mempengaruhi cara kerja, misalnya pelaksanaan intruksi pengawasan serta evaluasi
2. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan lainnya sehingga adanya kelengkapan dan keterkaitan antar kegiatan yang memerlukan cross cutting dalam pelaksanaan dan evaluasinya
3. Tetap dilaksanakan pengawasan yang efektif secara berjenjang guna memperlancar proses kegiatan.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Program Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--|--------------------------------|--------|-----------|-----------|---|--|-----------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | BB | A | 112.5 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Sakip Perangkat daerah | 112.5 | Menunjang |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Baik | 100 | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 100 | Menunjang |
| 2 | Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa | Indeks Desa Membangun | Maju | Maju | 100 | PROGRAM PENATAAN DESA | Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik | 100 | Menunjang |
| | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Persentase Kerjasama yang difasilitasi | 100 | Menunjang |
| | | | | | | | Persentase Pembangunan Kawasan Pedesaan | 100 | Menunjang |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|-----------|
| | | | | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | 143.33 | Menunjang |
| | | | | | | | Persentase Desa Tertib Administrasi | 150 | Menunjang |
| | | | | | | | Persentase Pembinaan Bum Desa | 100 | Menunjang |
| | | | | | | | Persentase Penertiban Aset Desa | 120 | Menunjang |
| | | | | | | | Persentase Kepala Desa yang Dibina | 100 | Menunjang |
| | | | | | | | Persentase Aparatur Desa yang dibina | 133 | Menunjang |
| | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Rata-rata Jumlah Binaan kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | 100 | Menunjang |
| | | | | | | | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK | 100 | Menunjang |
| | | | | | | | Persentase LSM Aktif | 100 | Menunjang |
| | | | | | | | Persentase PKK Aktif | 100 | Menunjang |
| | | | | | | | Persentase Posyandu Aktif | 100 | Menunjang |
| | | | | | | | Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat | 100 | Menunjang |

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada APBD Perubahan Tahun 2024 mencapai sebesar Rp18.648.089.283,00 atau 89,15 % dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp20.915.340.176,00. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan teknis pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai sebesar Rp8.792.046.291,00 atau 91 % dari anggaran yang dialokasikan sebesar 9.623.818.915,00. Sedangkan Realisasi untuk Program/Kegiatan Non Teknis atau Program/Kegiatan Pelaksanaan Kesekretariatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purwakarta mencapai sebesar

Rp9.856.042.992,00 atau 87 % dari anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp11.291.521.261,00.

Pada tahun 2024 ini tercatat hutang kegiatan sebesar Rp. 208.895.990,- hal ini dikarenakan tidak ada kecukupan dana atau persediaan kas yang tidak memungkinkan terbayar pada tahun 2024 pada kas Pemerintah Daerah. Utang ini terdiri dari utang belanja rutin jasa Listrik dan internet, tunjangan pegawai bulan Desember 2024 dan Gaji Pegawai Honorer bulan Desember 2024.

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung dalam APBD Perubahan Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran sebagai berikut :

| Kode | Unitas / Subunitas / Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | | | | | | Pagu Kegiatan dan Sub Kegiatan (Rp) | Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan (%) | Keterangan Sisa Dana (APBD Kabupaten Purwakarta, APBD Program Jasa) | | | | | |
|------|--|--------------------------|--------|---------------------------|--------|--|--|---------------------|--|----------|-------------------------------------|---|---|------|-------------|--------------------|----------------------|--|
| | | Capaian Program/Kegiatan | | Kelasifikasi Sub Kegiatan | | | Hasil Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| | | Totol Utkr | TARGET | Totol Utkr | TARGET | Realisasi | Totol Utkr | TARGET | Realisasi | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 02 | 05 | Koordinasi dan Pengusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik ; Predikat | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1Laporan | 1Laporan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 10,000,000 | 3,905,400 | APBD Kab. Purwakarta | |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada | | | | | | | | | 100% | 18,760,000 | 14,393,600 | |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 03 | 05 | Rekonsiliasi dan Pengusunan Laporan Brang Milik Daerah pada SKPD | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik ; Predikat | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Pengusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 1Laporan | 1Laporan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 18,760,000 | 14,393,600 | APBD Kab. Purwakarta | |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 05 | | Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | 100% | 92,500,000 | 72,911,000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik ; Predikat | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya | 1Paket | 1Paket | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 55,000,000 | 55,000,000 | APBD Kab. Purwakarta | |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik ; Predikat | Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 2 Orang | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 37,500,000 | 17,911,000 | APBD Kab. Purwakarta | |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | 83% | 639,939,195 | 451,693,897 | |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 06 | 01 | Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik ; Predikat | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1Paket | 1Paket | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 50,000,000 | 50,000,000 | APBD Kab. Purwakarta | |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 06 | 03 | Pengadaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik ; Predikat | Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan | 2Paket | 2Paket | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 50,000,000 | 45,218,000 | APBD Kab. Purwakarta | |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 06 | 04 | Pengadaan Bahan Logistik Kantor | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik ; Predikat | Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan | 3Paket | 3Paket | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 202,022,195 | 144,850,500 | APBD Kab. Purwakarta | |

| Kode | Batasan Anggaran Unitas Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | | | | | | Page Kegiatan dan Sub Kegiatan (Rp) | Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan (Rp) | Keterangan Sumber Dana (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Dana) |
|------|---|--|--|------------------------|---|-----------|--------------------|--|-----------|------|-------------------------------------|--|--|
| | | Capaian Pengantar/Indikator | | Kebijakan Sub Kegiatan | | | Hasil Sub Kegiatan | | | | | | |
| | | Titik Ujar | Tarapan | Titik Ujar | Tarapan | Realisasi | Titik Ujar | Tarapan | Realisasi | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2 | 13 01 2 06 05 | Pengadaan Barang Cetak dan Pengandaan | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik : Predikat | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan | 1Paket | 1Paket | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 85,008,000 | 84,530,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 01 2 06 09 | Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik : Predikat | Jumlah Laporan Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1Laporan | 1Laporan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 215,409,000 | 127,095,387 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 01 2 06 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik : Predikat | Terlaksananya Penatausahaan Arsip | 1Dokumen | 1Dokumen | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 0% | 37,500,000 | 0 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 01 2 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah | | | | | | | 100% | | 539,444,500 | 538,915,427 | |
| 2 | 13 01 2 07 07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik : Predikat | Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di sediakan | 1Unit | 1Unit | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 71,400,000 | 71,400,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 01 2 07 07 05 | Pengadaan Mebel | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik : Predikat | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1Unit | 1Unit | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 96,542,000 | 96,171,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 01 2 07 07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik : Predikat | Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan | 10 Unit | 10 Unit | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 174,808,000 | 174,808,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 01 2 07 07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik : Predikat | Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan | 1Unit | 1Unit | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 196,693,500 | 196,538,427 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 01 2 08 | Pengadaan Jasa Penunjang Urusan | | | | | | | 100% | | 4,242,666,104 | 3,704,278,329 | |
| 2 | 13 01 2 08 01 | Pengadaan Jasa Surat Mengurut | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik : Predikat | Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surat Mengurut | 1Laporan | 1Laporan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 3,000,000 | 3,000,000 | APBD Kab. Purwakarta |

| Kode | Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | | | | | | Pagu Kegiatan dan Sub Kegiatan (Rp) | Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan (Rp) | Keterangan Sumber Dana (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBD Pusat) | | | | |
|------|---|--------------------------|------|--------|------------------------|---|--|--------------------|---|------------|-------------------------------------|---|--|------|---------------|---------------|----------------------|
| | | Capaian Program/Kegiatan | | | Kebijakan Sub-Kategori | | | Hasil Sub-Kategori | | | | | | | | | |
| | | Tingkat Uraian | Tipe | Target | Tingkat Uraian | Tipe | Realisasi | Tingkat Uraian | Tipe | Realisasi | | | | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 08 | 02 | Pengediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik; Predikat | Jumlah Laporan Pengediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 465,600,000 | 439,860,500 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 06 | 04 | Pengediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik; Predikat | Jumlah laporan Pengediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 3,773,466,804 | 3,261,417,828 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | | | | | 75% | | 682,014,160 | 479,496,174 | |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 09 | 01 | Pengediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik; Predikat | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibagikan Pajaknya | 11 Unit | 11 Unit | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 161,090,700 | 88,131,174 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik; Predikat | Jumlah Mebel yang di Pelihara | 10 Unit | 0 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 0% | 10,000,000 | 0 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik; Predikat | Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 380,923,400 | 380,005,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 01 | 2 | 09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat | BB; Baik; Predikat | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 50,000,000 | 11,360,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 02 | | | | PROGRAM PENATAAN DESA | Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik | 30% | Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik | 30% | 30% | Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik | 30% | 100% | 60,160,000 | 47,675,000 | |
| 2 | 13 | 02 | 2 | 01 | | Pengelolaan Penataan Desa | | | | | | | 100% | | 60,160,000 | 47,675,000 | |

| Kode | Uraian Kinerja Berkas dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | | | | | | Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan (Rp) | Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan (Rp) | Keterangan Sumber Dana (APBD Kabupaten, Provinsi, APBD Tribunal Desa) | | | |
|------|--|--------------------------|--------|------------------------|---|-----------|-------------------|--|-----------|-----------|---|---|---|-------------|-------------|----------------------|
| | | Capaian Program/Kegiatan | | Kualitas dan Kuantitas | | | Masa dan Kualitas | | | | | | | | | |
| | | Total Utkr | Target | Total Utkr | Target | Realisasi | Total Utkr | Target | Realisasi | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| | | | | 45% | Persentase Aparatur Desa yang dibina | 45% | 133% | Persentase Aparatur Desa yang dibina | 45% | 133% | | | | | | |
| 2 | 13 04 2 01 | | | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | 34% | 1,774,470,600 | 1,397,651,600 | | | | |
| 2 | 13 04 2 01 01 | | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 150,000,000 | 56,687,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 04 2 01 02 | | | | Fasilitasi Pengurusan Produk Hukum Desa | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengurusan Produk Hukum Desa | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 30,000,000 | 23,300,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 04 2 01 03 | | | | Fasilitasi Pengurusan Perencanaan Pembangunan Desa | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengurusan Perencanaan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 63,196,600 | 31,478,600 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 04 2 01 04 | | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 150,000,000 | 146,480,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 04 2 01 05 | | | | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | | | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 183 Orang | 183 Orang | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 150,000,000 | 148,700,000 | APBD Kab. Purwakarta |

| Kode | Struktur Organisasi Dinas/Instansi Pemerintahan | Indikator Kinerja | | | | | | | | | Page Anggaran Jus Pak Kegiatan (Rp) | Realisasi Anggaran dan Page Kegiatan Pak Kegiatan (Rp) | Keterangan Kinerja Desa (APBD Kabupaten, Purwakarta, APBD Program Jarak) | | | | |
|------|---|--------------------------|--------|-----------------------|--------|--|--------------------|--------|--|-----------|---|---|--|------|-------------|-------------|----------------------|
| | | Capaian Program/Kegiatan | | Kategori Sub Kegiatan | | | Hasil Sub Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | Total Uluar | Target | Total Uluar | Target | Realisasi | Total Uluar | Target | Realisasi | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2 | 01 | 07 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | 2 Laporan | 2 Laporan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 23,730,000 | 23,730,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 04 | 2 | 01 | 08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 346,881,000 | 340,163,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 04 | 2 | 01 | 09 | Pengelolaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 2 Laporan | 2 Laporan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 111,100,000 | 100,065,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 04 | 2 | 01 | 09 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 2 Laporan | 2 Laporan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 30,000,000 | 16,402,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 04 | 2 | 01 | 11 | Fasilitasi Pengusunan Profil Desa | | | Jumlah Dokumen Profil Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 53,320,000 | 46,002,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 04 | 2 | 01 | 12 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 87,500,000 | 14,050,000 | APBD Kab. Purwakarta |

| Kode | Revisi | Bentuk Kegiatan | Uraian Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | | | | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran dan Sub Kegiatan (Rp) | Keterangan Sumber Dana (APNS, Ekuitas, Persewaan, APBD, Pinjaman, Dana) | | | | |
|------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------|--|--------|--------------------|---|-----------|--------------------|---|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Capaian Program/Kegiatan | | Kebijakan Sub Kegiatan | | Hasil Sub Kegiatan | | | | | | | | | |
| | | | | Total Uraian | TARGET | Total Uraian | TARGET | Realisasi | Total Uraian | TARGET | | | | Realisasi | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2 | 01 | 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Aset Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 100,000,000 | 98,800,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 04 | 2 | 01 | 14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | | | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 183 Orang | 183 Orang | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 150,000,000 | 148,500,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 04 | 2 | 01 | 15 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | Jumlah Desa yang Dfasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 85 Desa | 85 Desa | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 0% | 33,193,000 | 2,649,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 04 | 2 | 01 | 16 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa | 1 Laporan | 1 Laporan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 27,550,000 | 27,550,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 04 | 2 | 01 | 18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 200,000,000 | 181,105,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 05 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | | | | | 3,524,795,968 | 3,122,412,488 | |
| | | | | | | | | | Rata-rata Jumlah Binaan Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | 100% | 100% | Rata-rata Jumlah Binaan Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | 100% | 100% | | | |

| Kode | Isi Kode (Bidang, Desa, Kecamatan, Dan Program/Kegiatan) | Indikator Kinerja | | | | | | | | | Page Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Rp) | Realisasi Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Rp) | Keterangan Sumber Dana (APBD Kabupaten Purwakarta, APBD Provinsi Jawa Barat) | | | |
|------|--|---|--------|---|-----------------------|--------|--|---|-----------|-----------|---|--|--|-------------|-------------|----------------------|
| | | Capaian (Program/Kegiatan) | | | Kategori Sub Kegiatan | | | Hasi Sub Kegiatan | | | | | | | | |
| | | Totol Ular | Target | Realisasi | Totol Ular | Target | Realisasi | Totol Ular | Target | Realisasi | | | | | | |
| | | Rata-rata Jumlah Kelompok | 100% | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK | 100% | 100% | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | Persentase LSM Aktif | 100% | Persentase LSM Aktif | 100% | 100% | Persentase LSM Aktif | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | Persentase PKK Aktif | 100% | Persentase PKK Aktif | 100% | 100% | Persentase PKK Aktif | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | Persentase Posyandu | 100% | Persentase Posyandu Aktif | 100% | 100% | Persentase Posyandu Aktif | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat | 5% | Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat | 5% | 100% | Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat | 5% | 100% | | | | | | | |
| 2 | 13 | 05 | 2 | 01 | | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan | | | 100% | 3.524.766.000 | 3.122.412.468 | | | | |
| 2 | 13 | 05 | 2 | 01 | 02 | | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 364.300.000 | 349.280.000 | APBD Kab. Purwakarta |

| Kode | Tipe dan Bidang Usaha, Pemasokan, Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | | | | | | Page Anggaran dan Sub Kegiatan (Rp) | Realisasi Anggaran dan Sub Kegiatan (Rp) | Keterangan Sumber Dana (APBD Kategori Pencapaian APBD Pembagi, Jenis) | | | | |
|------|--|--------------------------|--------|-----------------------|--------|--|--------------------|--------|--|-----------|---|---|---|------|-------------|-------------|----------------------|
| | | Capaian Program/Kegiatan | | Kategori Ada Kegiatan | | | Hasil Sub Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Realisasi | Tolak Ukur | Target | Realisasi | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 2 | 13 | 05 | 2 | 01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya | 5 Lembaga | 5 Lembaga | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 150,000,000 | 101,567,500 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 05 | 2 | 01 | 05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan pendapatan Asli Desa | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan asli Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 250,000,000 | 219,621,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 05 | 2 | 01 | 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 1 Laporan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 177,405,000 | 139,745,420 | APBD Kab. Purwakarta |

| Kode | Lokasi Wilayah Desas/Perumahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | | | | | | | | Pagu Kebutuhan dan Nilai Kegiatan (Rp) | Realisasi Kegiatan dan Nilai Kegiatan (Rp) | Gedung/Desa Desa (Kantor Desa/Perumahan Purwakarta, APBD Prinsipal dan) | | | | |
|------|---|--------------------------|--------|------------------------|--------|--|--------------------|--------|--|----------|--|---|---|---------|---------------|---------------|----------------------|
| | | Capaian Program/Kegiatan | | Kehadiran Sub Kegiatan | | | Hasil Sub Kegiatan | | | | | | | | | | |
| | | Total Utk | Tercap | Total Utk | Tercap | Realisasi | Total Utk | Tercap | Realisasi | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 05 | 2 | 01 | 07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1Laporan | 1Laporan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 343,192,000 | 340,358,000 | APBD Kab. Purwakarta |
| 2 | 13 | 05 | 2 | 01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1Dokumen | 1Dokumen | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 2,239,868,000 | 1,971,250,488 | APBD Kab. Purwakarta |
| | | | | | | Nilai Capaian DPMD Tahun 2024 | | | | | | | | 39.375% | | | |

3.2.1 Mengukur Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kementerian Negara lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran dengan capaian keluaran.

Rumus mengukur tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n_i} (\text{PAKi} \times \text{Cki}) - \text{RAKi}}{\sum_{i=1}^{n_i} (\text{PAKi} \times \text{CKi})} \times 100\%$$

1. Indikator Capaian Sakip Perangkat Daerah

$$E = \frac{((11.291.521.261 \times 112.5) - 9.856.042.992)}{(11.291.521.261 \times 112.5)} \times 100\%$$
$$= 99.22\%$$

2. Indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

$$E = \frac{((11.291.521.261 \times 100) - 9.856.042.992)}{(11.291.521.261 \times 100)} \times 100\%$$
$$= 99.12\%$$

3. Indikator Capaian Indeks Membangun (IDM)

$$E = \frac{((9.623.818.915 \times 100) - 8.792.046.291)}{(9.623.818.915 \times 100)} \times 100\%$$
$$= 99.08\%$$

Tabel 3.9
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | | | Anggaran | | | |
|----|---|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian | Tingkat Efisiensi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitasnya Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | BB | A | 112.5 | 11.291.521.261 | 9.856.042.992 | 87% | 99.22 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Baik | 100 | 11.291.521.261 | 9.856.042.992 | 87% | 99.12 |
| 2 | Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa | Indeks Desa Membangun | Maju | Maju | 100 | 9.623.818.915 | 8.792.046.291 | 91% | 99.08 |

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, setiap Pemerintah Daerah harus membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dibuat atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi selama Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja Pencapaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, bahwa hampir semua telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara dari aspek realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2024 mencapai sebesar **89.15 % (Termasuk Belanja Non Teknis/Pelaksanaan Kesekretariatan DPMD)**. Adapun sasaran-sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa ;

Timbulnya permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 harus mendapat perhatian yang serius dan hendaknya digunakan sebagai motivasi bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta untuk lebih meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Permasalahan dan hambatan yang harus mendapat perhatian diantaranya adalah :

1. Kurang semangatnya Kepala Desa dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena masih rendahnya kapasitas Kepala Desa dan Masyarakatnya, hal ini memunculkan tidak paham akan pentingnya keberadaan BUMDes.
2. Masih Rendahnya kapasitas dan kepedulian masyarakat sehingga dalam melakukan kegiatan kesulitan mencari kader baru.
3. Pengelolaan Tata Pemerintahan Desa belum optimal hal ini ditandai masih adanya Desa yang belum melaksanakan pedoman teknis peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, pembentukan peraturan desa.

Langkah-langkah yang akan diupayakan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa kedepan adalah :

1. Meningkatkan jumlah usaha ekonomi masyarakat khususnya BUMDes dengan terus diadakan pembinaan yang lebih intensif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi desa/sumber daya alam.
3. Memfasilitasi Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RT-RW, TP-PKK, Posyandu) agar aktif berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan jumlah kader pemberdayaan masyarakat sebagai tenaga fasilitator dan motivator pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan tata pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa

Pentingnya komitmen dan dukungan semua pihak untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan desa. Sinkronisasi perencanaan dan anggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta di masa yang akan datang sehingga dapat memberi manfaat yang luas kepada masyarakat maupun kepada pihak yang berkepentingan.

Purwakarta, 18 Februari 2025

Pt. KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA



H. RAHMAT HERIANSYAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19681107 199010 1 001